

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan suatu negara. Dengan adanya kewajiban bagi daerah untuk ikut serta melancarkan jalannya pembangunan, maka terdapat pemerataan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah semakin diperlukan semenjak diberlakukannya otonomi daerah. Pemerintah mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang tersebut sudah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 disertai dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 merupakan otonomi daerah, karena tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah, jadi kedua undang-undang tersebut saling melengkapi. Kedua undang-undang tersebut merupakan

perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah serta secara proporsional diwujudkan dalam bentuk, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah, penyaluran, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan asas kerakyatan yang berkesinambungan dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat (Sutedi, 2009). Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda), dimana Pemda mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun nonkeuangan.

Menurut Halim dalam Adrian Sutedi (2009), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan minimalnya ketergantungan bantuan kepada pemerintah pusat. Pemda harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, Pemda diberi keleluasaan untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagai sumber PAD, pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dalam pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada Pemda masing-masing dan dibantu oleh komponen masyarakat karena Pemda lebih mengetahui kondisi yang ada di daerahnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noordin (2004), menunjukkan bahwa pajak daerah belum dapat memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap pendapatan daerah, sehingga ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan otonomi daerah melalui pajak daerah belum terlaksana dengan baik.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen sumber PAD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi PAD, sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah. Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah, maka semakin besar pula PAD. Semakin tinggi kontribusi PAD dan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif

berarti sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Meningkatnya PAD akan memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka percepatan pembangunan di segala bidang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Apituley dan Makatita (2009), yaitu analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2002-2006 yang hanya menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dari segi ekonomi, dimana pada saat itu perekonomian belum stabil, sehingga menyebabkan PAD berfluktuasi sejalan dengan fluktuasi pada realisasi PAD. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, peneliti sekarang menganalisis pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD periode 2004-2011 dalam rangka mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM Mendukung Otonomi Daerah Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten?
2. Seberapa besar kontribusi dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten?
3. Apakah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten selama ini sudah efektif dan efisien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten.
3. Mengetahui apakah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten selama ini sudah efektif dan efisien.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat penelitian ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Praktis

- a. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten.
- b. Memberikan masukan saran bagi Pemda Klaten dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah dan mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten, khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Teoritis

Menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya dan mampu dijadikan rujukan atas penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian dan akan digunakan sebagai pedoman dalam

menyelesaikan masalah penelitian yang ada, penelitian terdahulu yang terkait, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN. Dalam bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP. Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan serta bermanfaat bagi Pemda Kabupaten Klaten, penulis maupun pembaca.